

KAJIAN ATAS KANDUNGAN INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI ACUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

D. Darmawati¹⁾, Andi Kusumawati²⁾, N. Nurleni³⁾, Rusman Thoeng⁴⁾
Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

Based on the Information Content Theory, the content of accounting information from the financial statements of the incumbent will be reviewed which can change voter behavior in making decisions. And agency theory in the context of the public sector, a principal-agent relationship exists between the two people as elected voters and leaders. The elected leader is an agent who is given a mandate from his constituents. This research is important because it can be a reference for voters to make choices in elections. The research instrument is secondary data from the financial reports of local governments three years before the election. Using quantitative methods, testing the causal relationship of the hypothesis is analyzed by multiple linear regression. The study population for the Sulawesi region, the research sample of 30 incumbent regions that participated in the simultaneous regional elections in 2017 and 2018. The results showed that the ratio of financial independence had a positive effect on the incumbent's electability while the debt-to-income ratio had an effect. This research is important because it can provide recommendations for improving governance in Indonesia.

Keywords: *Election, incumbent electability, bath ratio, debt ratio.*

1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan pertarungan kontitusional sebagai mekanisme perubahan rezim kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, berfungsi sebagai pertarungan dan kontrol kekuasaan. Pemilu merupakan momentum peralihan kepemimpinan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Proses ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang harus dilaksanakan secara jujur dan demokratis. Pemilihan umum kepala daerah merupakan proses demokrasi memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat undang-undang.

Fenomena yang terjadi adalah meningkatnya korupsi di daerah sejak pelaksanaan otonomi daerah (Suhardjanto, Djuminah, & Agustiniingsih, 2020) menjadi bukti penerapan tersebut tidak sesuai harapan, menurut ICW ada 169 kasus yang terjadi dengan tersangka ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020.(www.cnnindonesia.com) sedangkan berdasarkan data KPK hingga Mei 2020, pelaku korupsi terbanyak adalah swasta 297 orang, anggota DPR dan DPRD 257, pejabat Eselon I, II, dan III 225, bupati dan wali kota 119, kepala kementerian/lembaga 28, hakim 22, gubernur 21, pengacara 12, jaksa, 10 dan lain-lain.(www. Alinea.id). Adanya 119 bupati/walikota dan 21 gubernur dalam kasus ini menandakan masyarakat telah salah memilih kepala daerah.

Kepala daerah yang memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dambaan setiap warga negara karena kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat akan menjamin kebutuhan dasar masyarakat.(Evamitria, Akmal Umar, & Hasmin Tamsah. (2016). hal ini bisa menjadi acuan bagi pemilih pada saat pemungutan suara terutama untuk calon petahana, pemilih bisa memberikan kesempatan jika kinerja petahana baik dan bisa menghukumnya jika buruk. Pada penelitian ini fokus yang akan di kaji adalah informasi akuntansi dari laporan keuangan petahana mengenai kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap pendapatan dikaitkan dengan terpilihnya kembali petahana.

Penelitian yang dilakukan oleh balaguar-Coll & Brun-Mantos (2013); (Rumaya, 2014); (Chorthareas (2016); Cunha, Fereira, & fernades (2018); Darmawati, at.all (2019) menemukan rasio kemandirian keuangan berhubungan positif dengan terpilihnya kembali petahana sedangkan Sulaiman (2017) sebaliknya. Rasio Utang terhadap pendapatan telah diteliti oleh Brender dan Drazen (2004) berpengaruh positif atas terpilihnya kembali petahana sedangkan penelitian Aidt, et. al. (2009); Chorthareas (2016); Cunha, Gomes dan Vernades (2018) menemukan sebaliknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berlokasi di wilayah sulawesi di Indonesia yang mempunyai calon petahana sebanyak 30 daerah pemilihan. Hasil penelitian diharapkan dapat

¹ Korespondensi penulis: Darmawati, Telp.085242778636 , darma.ak@unhas.ac.id1

dijadikan acuan bagi pemilih sebelum menentukan suara dan menjadi rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahannya di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Kandungan Informasi (*Content of Information Theory*)

Konsep informasi dan kandungan informasi dari pesan secara umum dan laporan akuntansi khususnya diawali dari revolusi cara berpikir manusia tentang informasi. Hasil penelitian (Ross, 2013) secara formal menggambarkan sistem komunikasi informasi yang memainkan peran utama. Konsep tentang kapasitas saluran informasi, ketidakpastian sumber, dan laju optimal pengiriman informasi dalam lingkungan yang bising. Dia merevolusi cara berpikir tentang informasi. Ross, 2013 mendefinisikan informasi sebagai perubahan distribusi status-probabilitas peristiwa tertentu (variabel) setelah pengiriman pesan dari sumber ke pengguna. Konsep inilah yang dijadikan dasar pemeriksaan terhadap kandungan informasi dari angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.

Konten informasi tidak hanya harus berubah dalam harapan tetapi juga perubahan besar ke dalam perilaku pengambilan keputusan (Beaver, 1968) dan (Ross, 2016) telah meneliti dan membuktikan bahwa informasi akuntansi keuangan dan pelaporan dapat dikatakan mempunyai kandungan informasi.

2.2 Principal - Agency Theory

Dalam konteks sektor publik, Hubungan principal-agent ada di antara keduanya masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin terpilih. Pemimpin terpilih merupakan agen yang diberikan mandat dari pemilihnya. Asumsi mendasari dari hubungan secara umum, pemilih dan pemimpin terpilih adalah rasional. Mereka bertindak untuk memaksimalkan utilitas individu mereka. Pemimpin yang dipilih dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kekuatannya sebab itulah dia membutuhkan suara pemilih, sedangkan pemilih termotivasi oleh manfaat ekonomi bagi dirinya kesejahteraan pemilih bergantung pada tindakan agen, sehingga setiap pemilih memiliki insentif untuk pantau aksi agen (Zimmerman, 1977).

Penerapan teori principal-agent untuk mengendalikan pemimpin terpilih (gubernur/walikota / bupati) melalui pemilukada. Pemilih pada daerah pemilihan lokal dapat mengevaluasi petahana sebelum menentukan pilihan.

2.3. Informasi Kinerja Keuangan

Informasi akuntansi bisa cerminan hasil kebijakan publik dan menjadi kendaraan untuk mengomunikasikan efek ekonomi dari manajemen politik ((Brusca & Montesinos, 2006). Data akuntansi menjadi dasar untuk menginterpretasikan kinerja masa lalu dan untuk memprediksi kinerja pada masa depan. BPK-RI sebagai lembaga independen yang dapat memastikan bahwa informasi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah tidak bias.

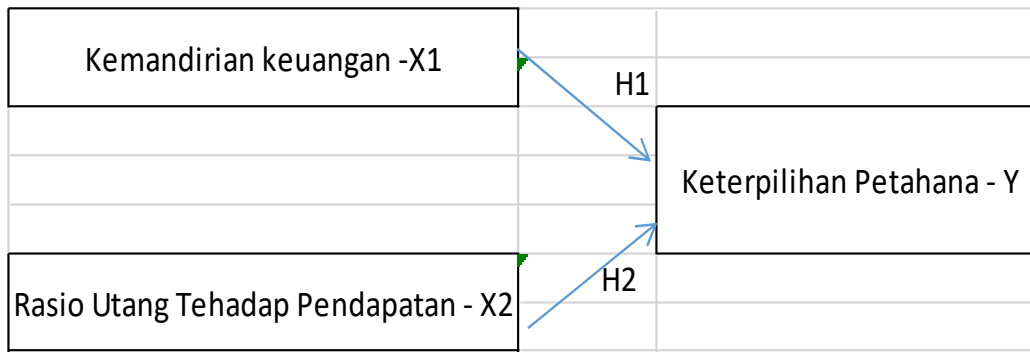
Kemandirian Keuangan Daerah, merupakan indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan *public service* bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Halim, 2013; Mahmudi, 2010). Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dan pendapatan daerah berasal dari sumber lainnya seperti *intergovernmental transfer* maupun dari pinjaman (Halim, 2013), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah, merupakan perbandingan antara total utang dan total pendapatan daerah. Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik (Mahmudi, 2010), dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Utang terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Adapun Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: Model Penelitian

Hipotesis Penelitian adalah:

H1: kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana .

H2: Rasio utang terhadap pendapatan berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana.

3. Metode Penelitian

Menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah tiga tahun sebelum pemilu. Populasi penelitian wilayah sulawesi, sampel penelitian 30 daerah petahana yang mengikuti pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 . pengujian hubungan kausal hipotesis dianalisis dengan regresi liner berganda, dengan model Penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1$$

Keterangan:

Y = Keterpilihan Petahana

β_0 = Konstanta

X₁ = Kemandirian keuangan daerah

X₂ = Rasio Utang terhadap Total Pendapatan

ε = Variabel Gangguan

4. Hasil dan Pembahasan

Variabel Independen	Koefisien	t	Sig	Keterangan
Konstanta	-4.880			
Rasio Kemandirian (X1)	1.764	3.732	.001	Signifikan
Rasio Utang Thd Pendapatan (X4)	.094	2.573	.017	Signifikan
$\alpha = 0,05$				

Sumber: Data Diolah, 2020

Adapun Bentuk Matematis adalah sebagai berikut:

$$Y = -4.880 + 1.764X_1 + 0.094X_4 + e \dots (1)$$

Pembahasan:

H1: kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana

Dari hasil pengujian H1, menggambarkan hasil positif signifikan hubungan antara kemandirian keuangan terhadap keterpilihan kepala daerah petahana searah dengan hipotesis berarti hipotesis diterima. Artinya semakin besar kemandirian keuangan semakin besar peluang keterpilihan kepala daerah petahana.

H2: Rasio utang terhadap pendapatan berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana.

Dari hasil pengujian H2: menggambarkan hasil positif signifikan hubungan antara kemandirian keuangan dan Rasio utang terhadap pendapatan terhadap keterpilihan kepala daerah petahana searah dengan hipotesis berarti hipotesis diterima. Artinya semakin besar kemandirian keuangan semakin besar peluang keterpilihan kepala daerah petahana.

5. Kesimpulan

1. Kemandirian keuangan berpengaruh atas keterpilihan kepala daerah petahana semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan semakin besar pula peluang petahana untuk terpilih kembali.
2. Rasio utang terhadap pendapatan berpengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah petahana, jika daerah dapat melunasi pinjamannya dari hasil pendapatan sendiri maka semakin besar peluang petahana untuk terpilih kembali.

6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti kemandirian keuangan daerah dan rasio utang terhadap pendapatan, penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel informasi akuntansi yang lebih luas.

7. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini adalah Penelitian dasar unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Universitas Hasanuddin dan LP2M Unhas, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, Toke S, Francisco José Veiga, dan Linda Gonçalves Veiga. 2009. Election Results and Opportunistic Policies: A New Test of the Rational Political Business Cycle Model Metropolitan Boroughs 1902–1937, *Journal of Public Economics* 112 (2014) 53–71
- Balaguer-Coll, M., & Brun-Martos, M. (2013). El Efecto del Gasto Público sobre las Posibilidades de Reección de los Gobiernos Locales. *The Accounting Review*, 16(1), 74–80.
- Beaver, W. H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*, 6, 67–93. <https://doi.org/10.2307/2490071>
- Brender, Adi and Allan Drazen. 2004. “political Budget Cycles in new versus Democracies.” NBER Working Paper No. 10538, June 2004 JEL No. D72, E62, D78
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are citizens significant users of government financial information? *Public Money and Management*, 26(4), 205–209. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2006.00526.x>
- Chortareas, Georgios, Vasileios Logothetis, & Andreas A. Papandreou. (2016). Political Budget Cycle and Reelection Prospects in Greece's Municipalities, *European Journal of Political Economy*. doi: 10.1016/j.ejpolco.2016.02.001
- Cunha, Ana Maria, Augusta Ferreira dan maria Jose Fernandes, (2018). The Influence of Accounting Information and Sosial Economic Factors in the Re-Election of Portuguese the Mayors. *A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series. Capter 19*. Information Science Reference (an imprint of IGI Global).
- Darmawati, D., Pagalung, G., Mediaty, M., & Damayanti, R. A. (2019). Effect of the Contents of Information on the Accountability of the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Against the Re-Election of Incumbents. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 92(Icame 2018), 119–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.60>
- Evamitria, Akmal Umar, & Hasmin Tamsah. (2016). Pengaruh Rasio Kemandirian, Efektifitas Dan Pertumbuhan Pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, 1(1), 50–59.
- Halim, Abdul. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham, Muhammad Aqil. (2016). “Demokrasi Bermuka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia.” Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, Edisi 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Rogers, Jonathan dan Marcelo Tyszler. (2016). Information and Economic Voting. *Political Science Research and Methods*. Available on CJO 2016 doi: 10.1017/psrm.2016.27.
- Ross, J. F. (2013). The Information Content of Accounting Reports: An Information Theory Perspective. *SSRN Electronic Journal*, (December). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2342403>
- Ross, J. F. (2016). The information content of accounting reports: An information theory perspective. *Information (Switzerland)*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/info7030048>

- Rumayya, Batubara. 2014. Electoral Accountability of Local Government in Post-Decentralized Indonesia: Does Economy Matters? *The 12th IRSA International Conference*. 2-3 Juni 2014, Makassar Sout Sulawesi, Indonesia.
- Suhardjanto, D., Djuminah, D., & Agustiningsih, S. W. (2020). Regional Financial Performance, Audit Function, and Corruption Levels in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 81-90.
- Sulaiman, Syarif Hidatullah. (2018). Akuntabilitas Electoral di Indonesia : Pengaruh kandungan informasi kinerja Pemerintah terhadap terpilihnya Petahana, Simposium Nasional Akuntansi XXI Samarinda.
- Zimmerman, J. L. (1977). Discussion of The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15(1977), 145. <https://doi.org/10.2307/2490637>
- <https://www.alinea.id/nasional/kpk-korupsi-telah-terjadi-di-27-provinsi-di-indonesia-b1ZVx9yfN>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200930124534-12-552660/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp392-t-di-2020>